

Libatkan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Serahkan Berbagai Penghargaan Lingkungan Hidup



Sumber gambar:

<https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2022/12/29/libatkan-masyarakat-dlh-kalsel-serahkan-berbagai-penghargaan-lingkungan-hidup/>

Sebanyak 147 desa di Kalimantan Selatan, masuk dalam Program Kampung Iklim (Proklam) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Desa-desanya tersebut terdaftar di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) berdasarkan usulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 dan menjadi yang terbanyak di Indonesia.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan Apresiasi Proklam, Mitra Proklam, Sasangga Banua dan Lomba Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Tingkat Provinsi Kalsel 2022.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Plt Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengatakan, Proklam adalah salah satu upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Proklam adalah aksi peningkatan kualitas lingkungan hidup dimana masyarakat selaku ujung tombaknya.

Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, program kampung iklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola Kementerian LHK sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim, sekaligus salah satu agenda prioritas dunia untuk menyelamatkan kehidupan bumi. Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim secara sukarela. Tahun ini adalah tahun terbaik Kalsel, dimana program kampung iklim mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 2022 ini, diakui Hanifah, usulan kampung iklim Kalsel merupakan terbanyak se-Indonesia dengan jumlah kampung iklim yang terdaftar pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebanyak 147 desa/lokasi. Terhadap upaya baik ini, Gubernur memberikan apresiasi berupa sembilan unit kendaraan roda tiga serta 30 set bak sampah tiga terpilah.

Menurut Hanifah, capaian ini turut mendukung penuh target Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia dengan 20.000 desa sebagai kampung iklim di 2024 dan juga menjadi bukti nyata betapa tingginya perhatian Gubernur akan lingkungan. Selain itu, Kalsel juga mendapatkan penghargaan Proklim kategori pembina yang telah diserahkan secara langsung oleh Menteri KLHK beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Raihan penghargaan ini juga didapatkan oleh beberapa kabupaten/kota lainnya di Kalsel antara lain Kota Banjarmasin, kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala.

Hal ini juga membuktikan fungsi pemerintah daerah sebagai pembina dalam terus mendukung program kampung iklim dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, pendampingan, hingga memberikan penghargaan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga diberikan apresiasi kepada peraih penghargaan Sasangga Banua. Apresiasi Sasangga Banua ini diberikan Gubernur kepada pejuang dan pembina lingkungan hidup terhadap kepeloporan dan konsistensi dalam menjaga lingkungan hidup.

Penghargaan diberikan kepada Kabupaten HSS sebagai peraih penghargaan Sasangga Banua kategori Pemerintah Daerah, Bank Sampah Ribang Bersinar Kabupaten Tabalong untuk kategori kelompok, dan Bapak Kosim dari Kabupaten HST untuk kategori individu/perorangan. Untuk penghargaan ini diberikan apresiasi berupa satu unit kendaraan roda tiga untuk kategori pemerintah daerah dan uang pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 untuk masing-masing kategori kelompok dan perorangan.

Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah diskala tapak, Gubernur turut memberikan apresiasi bagi peraih penghargaan lomba pengelolaan sampah berbasis masyarakat kepada Bank Sampah Daur's Purna Praja Kabupaten Banjar sebagai peringkat I, Bank Sampah Kunang-kunang Kota Banjarmasin sebagai peringkat II, dan Bank Sampah Derapha Kota Banjarbaru sebagai peringkat III. Lomba ini diberikan apresiasi berupa tiga unit mesin pencacah plastik untuk pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Diharapkan dengan apresiasi yang diberikan dapat bermanfaat dan lebih meningkatkan semangat dalam menjaga dan mengelola lingkungan dan juga menjadi momentum penting untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan terus berupaya menjadikan Banua lestari untuk anak-cucu dimasa yang akan datang.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/12/29/libatkan-masyarakat-dlh-kalsel-serahkan-berbagai-penghargaan-lingkungan-hidup/>, Libatkan Masyarakat, DLH Kalsel Serahkan Berbagai Penghargaan Lingkungan Hidup, 29 Desember 2022.

2. <https://kalsel.antaranews.com/video/3328035/147-desa-di-kalsel-masuk-dalam-proklam-klhk-2022>, 147 desa di Kalsel masuk dalam Proklam KLHK 2022, 29 Desember 2022.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

1. Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
2. Program Pembangunan Nasional
 - a. Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
 - b. Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.

- c. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 - d. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
 - e. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
 - f. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
 - g. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
 - h. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Rincian Program Pembangunan
- a. Kondisi Umum, Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
 - b. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah

mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

4. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025
 - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
 - c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
 - d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
 - e. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
 - f. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya

dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

- g. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- h. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- i. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- j. Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.